

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI (MULTIGUNA)  
DI BANK JATIM CABANG JOMBANG**

**RANGKUMAN TUGAS AKHIR**



Oleh :

**IRAYATI ANGGRAINI**

**2012110854**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

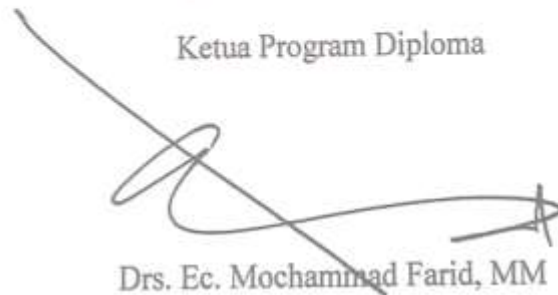
**2015**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Irayati Anggraini  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 27 Juni 1995  
NIM : 2012110854  
Program Pendidikan : Diploma III  
Jurusan : Manajemen  
Program Studi : Manajemen Keuangan dan Perbankan  
Judul : Prosedur Pemberian Kredit Pegawai Negeri  
(Multiguna) di Bank Jatim Cabang  
Jombang

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma




Drs. Ec. Mochammad Farid, MM

Dosen Pembimbing



Drs. Ec. Mochammad Farid, MM

Co. Dosen Pembimbing



Ali Soebijanto, S.H. M.H.

## **Latar Belakang Masalah**

Peranan perbankan sebagai lembaga keuangan sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas perekonomian nasional yang semakin meningkat dan teknologi semakin canggih. Untuk itu bank juga harus menciptakan berbagai produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beranekaragam, serta berusaha membuat nasabah percaya dan merasa aman dengan meningkatkan pelayanannya. Kredit merupakan sumber utama penghasilan Bank Pembangunan Jawa Timur. Bentuk kredit yang ditawarkan oleh bank pemerintah ini dapat memberikan keuntungan yang cukup berarti. Sebab dapat meringankan beban masyarakat khususnya pegawai negeri sipil untuk menambah modal usaha serta dapat membantu kelangsungan usahanya tersebut. Disamping itu, pemberian kredit pegawai ini juga memiliki sistem dan prosedur yang mudah dan cepat. Kredit jenis ini hanya bisa diberikan kepada PNS, CPNS, Pegawai/Calon Pegawai BUMN/BUMD, Anggota TNI/POLRI, Anggota Legislatif, Karyawan Perusahaan Swasta, Pensiunan dan Purnawirawan.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis sangat tertari melakukan penelitian di Bank Jatim Cabang Jombang dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang sedang penulis kerjakan mengenai produk *Lending* (Kredit). Maka dari itu penulis mengambil judul **“Prosedur Pemberian Kredit Pegawai Negeri (Multiguna) Di Bank Jatim Cabang Jombang”**.

## **Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang diatas, diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui persyaratan dan ketentuan dalam pemberian kredit pegawai negeri (multiguna),

prosedur pemberian kredit, mengetahui perhitungan plafon, bunga dan angsuran dan hambatan serta alternatif dalam penyelesaian hambatan tersebut.

### **Manfaat penulisan**

**Bagi Penulis** Menambah wawasan mengenai prosedur pemberian kredit secara umum dan memberikan informasi tentang pemberian kredit di bank Jatim Cabang Jombang. **Bagi Bank Jatim Cabang Jombang** Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan kredit dan sebagai sarana publikasi mengenai kegiatan operasional perbankan khususnya dalam prosedur pemberian kredit kepada para nasabah. **Bagi Pembaca** Sebagai media informasi yang berhubungan dengan prosedur pemberian kredit bank Bank Jatim Cabang Jombang dan sebagai sumbangan pemikiran kepada pembaca atau semua pihak. **Bagi Stie Perbanas** Dapat dijadikan sebagai penambahan pembendaharaan kepustakaan dan juga dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

### **Metode Pengamatan**

Metode pengamatan terdiri dari Lingkup Penelitian dan Prosedur Pengumpulan Data. **Lingkup Penelitian** membahas masalah yang akan ditekankan pada prosedur pemberian kredit pegawai negeri serta menganalisis hambatan dan alternatif penyelesaian terkait dengan prosedur pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Jombang. **Prosedur Pengumpulan Data** dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, studi pustaka dan literatur profil Bank Jatim Cabang Jombang.

### **Subjek Pengamatan**

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

### **Ringkasan Pembahasan**

Kredit multiguna (KMG) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan/penghasilan tetap (*Regular Income*). Dalam syarat pemberian kredit pegawai negeri di bank jatim cabang jombang adalah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pegawai BUMN/BUMD, calon pegawai (BUMN/BUMD), pegawai PERUM, Jawatan, Lembaga Pendidikan, anggota TNI/POLRI dll. Pegawai negeri tersebut harus mempunyai SK asli yang di gunakan sebagai agunan kredit.

Untuk prosedur pemberian terdapat beberapa prosedur yang harus di jalankan, yaitu prosedur pengajuan yang di lakukan langsung oleh calon debitur dengan mendatangi bank dan mengisi surat permohonan kredit serta membawa persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pengajuan, selanjutnya prosedur pencairan yang dilakukan langsung oleh pihak bank setelah mengecek keaslihan berkas, pencairan

tersebut disetujui langsung oleh pimpinan kredit, dilanjutkan dengan prosedur pembayaran angsuran yang dilakukan oleh bendahara gaji dengan menginformasikan bahwa gaji nasabah tersebut sudah terpotong untuk pembayaran angsuran dan yang terakhir prosedur pelunasan/penutupan untuk prosedur ini ada 2 cara, yaitu sesuai dengan jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo, untuk prosedur sebelum jatuh tempo maka nasabah diharuskan membayar sisa pokok pinjaman dan dikenakan bunga berjalan pada bulan pelunasan, dikenakan biaya administrasi 0,5%.

Perhitungan bunga kredit multiguna yaitu dengan menggunakan metode bunga *Annuitas Floating Rate*, Dengan demikian, jumlah bunga yang dibayar dari bulan ke bulan adalah berbeda (semakin kecil) karena dengan adanya angsuran yang dibayarkan maka sisa pokok pinjaman akan berkurang. Tetapi angsuran pokok semakin lama semakin besar, sedangkan bunga semakin lama semakin menurun.

permasalahan atau Hambatannya hambir 60% tidak ada. Karena nasabah atau debitur adalah orang yang bekerja di dinas pemerintahan yang setiap bulannya mendapatkan gaji dari pemerintah dan akan dipotong langsung untuk membayar angsuran kredit tersebut. Jadi pihak bank tidak merasa kesulitan untuk menagihnya dibandingkan dengan kredit umum lebih terancam kredit macet. Adapun hambatannya adalah SK palsu yang di berikan sebagai jaminan kredit pegawai negeri, Pemasaran yang baik kurang baik dan terjadinya mutasi pegawai.

### **Kesimpulan**

Kredit yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang Jombang merupakan jenis kredit yang bentuk pembiayaan diberikan kepada debitur yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di instansi-instansi pemerintah. **Syaratnya** harus mempunyai SK pegawai yang digunakan sebagai agunan/jaminan di Bank Jatim.

Prosedur **Pemberiannya** melewati (4) tahapan, yaitu (1) Prosedur Pengajuan, (2) Prosedur, Pencairan/*Realisasi*, (3) Prosedur Pembayaran Angsuran, (4) Prosedur Pelunasan/Penutupan, untuk pelunasan sebelum jatuh tempo dikenakan biaya 0,5% untuk administrasi dan harus membayar sisa pokok pinjaman serta dikenakan bunga berjalan pada saat bulan pelunasan. **Penentuan Plafon** menggunakan suku bunga *Anuitas Floating Rate*. **Permasalahan** ada (3), yaitu SK palsu, Pemasaran yang kurang baik, dan adanya Mutasi pegawai negeri. **Alternatif Penyelesaian** yang (1) dengan mengecek di BKN (Badan Kepegawaian Negara), (2) mempromosikan dengan cara mengadakan seminar seputar tanya jawab tentang kredit pegawai negeri (multiguna), (3) kredit yang telah diambil oleh pegawai negeri akan dialihkan ke bank jatim tempat debitur bekerja. Akan tetapi, jika pegawai negeri dimutasi/dipindahkan ke kota lain diluar wilayah jawa timur maka kredit yang diambil tidak bisa dialihkan dan harus dilunasi terlebih dahulu.

### **Saran**

Berdasarkan saran yang timbul, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain (1) melakukan survey atau peninjauan langsung ke dinas atau instansi tempat debitur bekerja, (2) pihak bank bisa menyponsori kegiatan yang berhubungan dengan PNS. Seperti Pelatihan Guru, (3), (4) Pihak bank harus lebih berhubungan baik kepada bendahara gaji.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Amin. 2013. *Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis & Disertasi*. Jakarta: Smart Pustaka
- Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Bank Jatim Cabang Jombang
- Iskandar, Syamsu. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama
- Jusuf, Jopie. 2007. *Panduan Dasar untuk Account Officer*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_ 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan